



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
( LKjIP )  
KECAMATAN KLIRONG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KLIRONG**

**Jl.Klegenwonosari N0. – Telp.- Kode Pos: 54381**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN KLIRONG**  
*Jalan Klegenwonosari Nomor : -Telp.- Klirong 54381.*

---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem ini juga mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya organisasi dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan masing-masing Instansi Pemerintah di dalam satu kerangka Sistem Akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diwajibkan menyusun laporan pencapaian tujuan strategis organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Penyusunan LKjIP dalam SAKIP dilakukan melalui penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

LKjIP memiliki peran sebagai instrumen pengendali, penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Untuk keperluan tersebut maka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata merupakan hal yang semestinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdasarkan kaidah hasil guna dan daya guna, akuntabel, dan bersih dari KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada. Masing-masing pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali.

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan organisasi kepadanya yang harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan:

1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
3. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja Instansi yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pelaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

## **B. Kedudukan Tugas dan Fungsi**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Klirong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Selain kedudukan sebagai Kepala SKPD, Camat adalah Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani urusan perekonomian Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Klirong**

No.	Jabatan	Eselon
1.	Camat	III.a
2.	Sekretaris Camat	III.b
3.	Kepala Seksi	IV.a
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b

Camat membawahi Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi sebanyak 4 seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

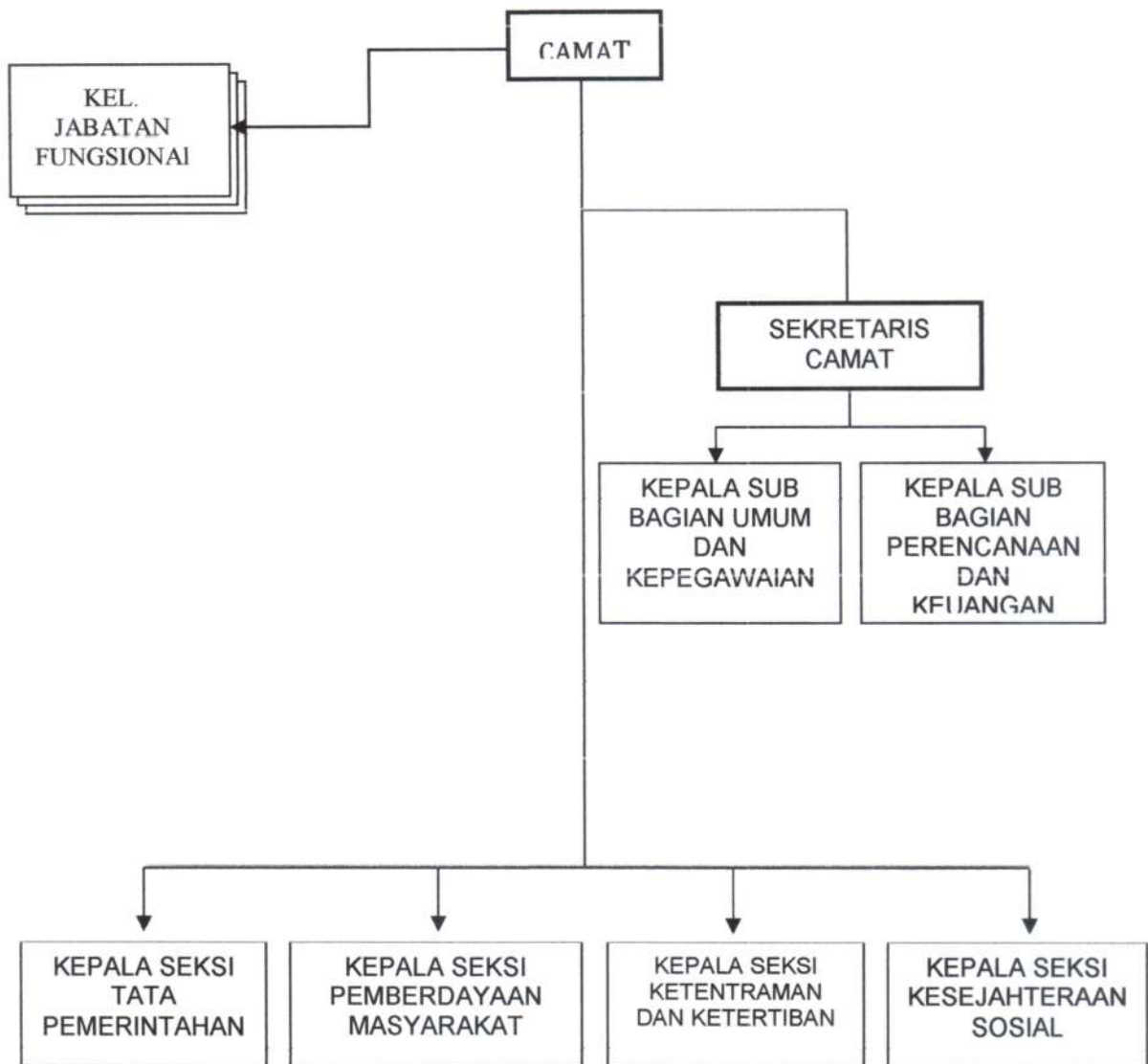
Sementara Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Kecamatan dimungkinkan adanya Jabatan Fungsional, tetapi sampai dengan saat ini belum ada realisasi pengisian jabatan tersebut.

Bagan organisasi Kecamatan Klirong dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

**Gambar 1.**  
**Bagan Organisasi Kecamatan Klirong.**



Aparatur Pemerintah Kecamatan Klirong pada tahun 2022 ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 6 orang. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Klirong sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Klirong**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Pely.Umum dan Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	6 Orang
	Jumlah	14 Orang

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

**Tabel 1.3**  
**Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan**

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	2 Orang
2.	Pembina	IV/a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I,	III/d	6 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I,	III/b	2 Orang
5.	Penata Muda,	III/a	1 Orang
6.	Pengatur Tingkat I,	II/d	1 Orang
7.	Pengatur,	II/c	1 Orang
	Jumlah		14 Orang

### C. Aspek Strategis/ Issue Strategis Organisasi

Untuk selalu tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah dengan cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus selalu terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan ber kelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Klirong untuk kondisi lima tahun kedepan :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan SKPD yang semakin baik;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan aparatur pemerintah; serta,
4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders).

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realitis, rasional dan konprehensif. Strategi Pemerintahan Kecamatan Klirong untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Klirong adalah "Terwujudnya Kecamatan Sebagai Institusi Pelayanan Masyarakat Yang Profesional " dan "Koordinator Pembina Kewilayahan yang profesional dengan upaya pendekatan yang berprinsip dengan pemberdayaan masyarakat" dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemberian Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi, peningkatan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi kepada pemerintah desa;
3. Penguatan Kapasitas kelembagaan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa;
4. Pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan, kelautan dan wisata.

Dari uraian di atas tentang visi, misi, arah kebijakan dan strategi kemudian dirumuskan *issue strategis* yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Klirong terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Meningkatnya potensi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain sumber daya perikanan dan kelautan termasuk potensi pengembangan wisata di Kecamatan Klirong.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini.

#### **2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis Kecamatan Klirong berisi program-program Rencana program Kecamatan Klirong berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah

dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

#### A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2026 Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

#### B. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2026 Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
  - a. Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
  - a. Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a. Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - c. Sub Keg Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
  - d. Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Sub Keg Penyediaan Bahan/Material;
  - f. Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - g. Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
  - c. Pengadaan Mebel.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan Mebel;
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan peralatan gedung kantor;
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
18. Pengadaan mebeleur;
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
21. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
22. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
23. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
24. Pembinaan sosial masyarakat;
25. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
26. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
27. Kegiatan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan);
28. Fasilitasi APBDes;
29. Fasilitasi program pembangunan;
30. Pembinaan PKK;

31. Pelatihan keterampilan bagi pemuda;
32. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
33. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN );
34. Penyelenggaraan Musrenbangcam.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	1.525.412.000	100%	1.600.158.000	100%	1.600.158.000	100%	1.600.158.000	100%	1.600.158.000	100%	7.926.044.000		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	10.500.000	11 Dokumen	10.700.000	11 Dokumen	10.700.000	11 Dokumen	11.164.000	11 Dokumen	10.700.000	55 Dokumen	53.764.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renstra, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA)	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	30 Dokumen	37.900.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKIP, LKPJ, LPPD, LK SKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.564.000	5 Dokumen	3.100.000	25 Dokumen	15.364.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.364.550.000	12 Bulan	1.384.844.000	12 Bulan	1.384.844.000	12 Bulan	1.384.844.000	12 Bulan	1.384.844.000	60 Bulan	6.903.926.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	13 Orang	13 Orang	13 Orang	1.340.550.000	13 Orang	1.352.935.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	65 orang	6.731.926.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan rakor dan konsultasi	0	15 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 orang	-	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan, Jumlah jenis dokumen pengelola administrasi keuangan Perangkat	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	24.000.000	7 Orang, 3 Jenis	31.899.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	35 Orang, 3 Jenis	122.000.000		

			Daerah																
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63.500.000	12 Bulan	66.200.000	12 Bulan	69.414.000	12 Bulan	66.200.000	12 Bulan	66.200.000	60 Bulan	323.514.000		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	6.000.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.400.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	31.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.514.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.500.000	60 Bulan	102.014.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.800.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	60 Bulan	72.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Express dan Tabloid)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.700.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	13.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	16.500.000	60 Bulan	83.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	4 orang/kali	4 orang/kali	5 orang/kali	3.000.000	8 orang/kali	4.000.000	10 orang/kali	5.000.000	12 orang/kali	4.000.000	14 orang/kali	4.000.000	50 Orang/kali	20.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60 Bulan	2.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Unit	24Unit	4 Unit	49.000.000	19 Unit	28.000.000	8 Unit	41.200.000	18 Unit	44.950.000	10 Unit	42.500.000	66 Unit	156.650.000		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	-	2 Unit	-	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	3 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	-	-	-	4 Unit	10.950.000	4 Unit	-	19 Unit	10.350.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	4 Unit	3 Unit	-	4 Unit	20.000.000	3 Unit	21.200.000	4 Unit	22.000.000	2 Unit	22.500.000	16 Unit	85.700.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	18 Unit	-	-	5 Unit	8.000.000	6 Unit	20.000.000	10 Unit	12.000.000	8 Unit	20.000.000	29 Unit	60.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	42.414.000	12 Bulan	210.914.000		

				<b>Daerah</b>															
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	60 Bulan	7.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	20.914.000	60 Bulan	104.414.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	19.500.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	60 Bulan, 1 Orang	99.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26 Unit</b>	<b>32 Unit</b>	<b>37 Unit</b>	<b>61.725.000</b>	<b>36 Unit</b>	<b>67.914.000</b>	<b>37 Unit</b>	<b>51.500.000</b>	<b>33 Unit</b>	<b>50.500.000</b>	<b>38 Unit</b>	<b>53.500.000</b>	<b>181 Unit</b>	<b>269.276.000</b>		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	8 Unit	10 Unit	10 Unit	28.000.000	10 Unit	29.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	29.000.000	12 Unit	29.000.000	52 Unit	145.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	21 Unit	12.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	15 Unit	20 Unit	14.725.000	20 Unit	15.000.000	24 Unit	15.000.000	18 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	100 Unit	67.362.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	17.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	2 Unit	7.000.000	8 Unit	27.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>358.765.000</b>		
	7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>71.753.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>71.753.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>71.753.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>71.753.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>71.753.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>358.765.000</b>		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, ), Jumlah THL PATEN yang terbayar	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	358.765.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
	7.01.05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>		

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	10 Kegiatan	70.000.000		
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	10 Kegiatan	70.000.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen
	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	123.500.000	100%	141.900.000	100%	132.280.000	100%	186.528.000	100%	128.051.000	100%	813.593.000		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	123.500.000	24 Desa	141.900.000	24 Desa	132.280.000	24 Desa	186.528.000	24 Desa	128.051.000	120 Desa	813.593.000		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	42.000.000	24 Desa	44.000.000	24 Desa	43.880.000	24 Desa	48.000.000	24 Desa	44.651.000	120 Desa	222.531.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen
	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	0	0		2 Desa	8.000.000	0		24 Desa	30.000.000	0		24 Desa	139.334.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen
	7.01.06.2.01.05	Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	2 Desa	4 Desa			6 Desa	3.500.000	6 Desa	3.000.000	6 Desa	4.000.000	6 Desa		24 Desa	10.500.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	15.500.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.700.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	2 Dokumen, 2 Kali	16.200.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	10 Dokumen, 10 Kali	77.400.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang di fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan	24 Desa, 0 Kali	24 Desa, 1 Kali	24 Desa, 1 Kali	6.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.200.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	24 Desa, 1 Kali	12.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	120 Desa, 5 Kali	37.000.000	Kecamatan Klorong	Kabupaten Kebumen



			ketentrangan dan ketertiban umum																		
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/ kel	24 Desa	24 Desa	24 Desa	28.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	35.000.000	24 Desa	30.000.000	120 Desa	153.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah kegiatan musrenbangcam	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 Kali		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pembinaan PKK	24 Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	22.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	29.328.000	4 Kegiatan	22.000.000	20 Kegiatan	121.328.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	24 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		15 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2KDes	24 Desa	24 Desa	24 Desa	10.000.000	24 Desa	10.500.000	24 Desa	10.000.000	24 Desa	12.000.000	24 Desa	10.000.000	120 desa	52.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
			Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako)	24 Desa	24 Desa	24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		120 Desa		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen		
	JUMLAH	4 PROGRAM, 9 KEGIATAN, 33 SUB KEGIATAN					1.734.665.000		1.939.145.000		1.818.191.000		1.872.439.000		1.813.962.000						

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah dilakukan perubahan 2 kali Kantor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen termuat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2022  
OPD KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	84,65	85,50	84,45	84,65	85,35	85,65
	Sasaran :								
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	84,65	85,50	84,45	84,65	85,35	85,65
	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawain	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	38	38	10	12	12	4
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	desa	24	24	24	24	24	24
	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori	Desa/ Jumlah Desa	6/24	6/24	6/24	6/24	6/24	6/24

Kategori Maju dan Mandiri	Maju dan Mandiri								
---------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.525.412.000,-	2.343.567.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	71.753.000,-	71.753.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.000.000,-	14.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.500.000,-	123.500.000,-	APBD

Kebumen, 30 Maret 2023

CAMAT KLIRONG



**EKO PURWANTO, S.STP., M.Si**

NIP.19790116 199810 1 001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### *3.1. Capaian Kinerja Organisasi*

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	<b>Tujuan</b>				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	86,53	104,25%
	<b>Sasaran</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	83	84,93	102,32%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

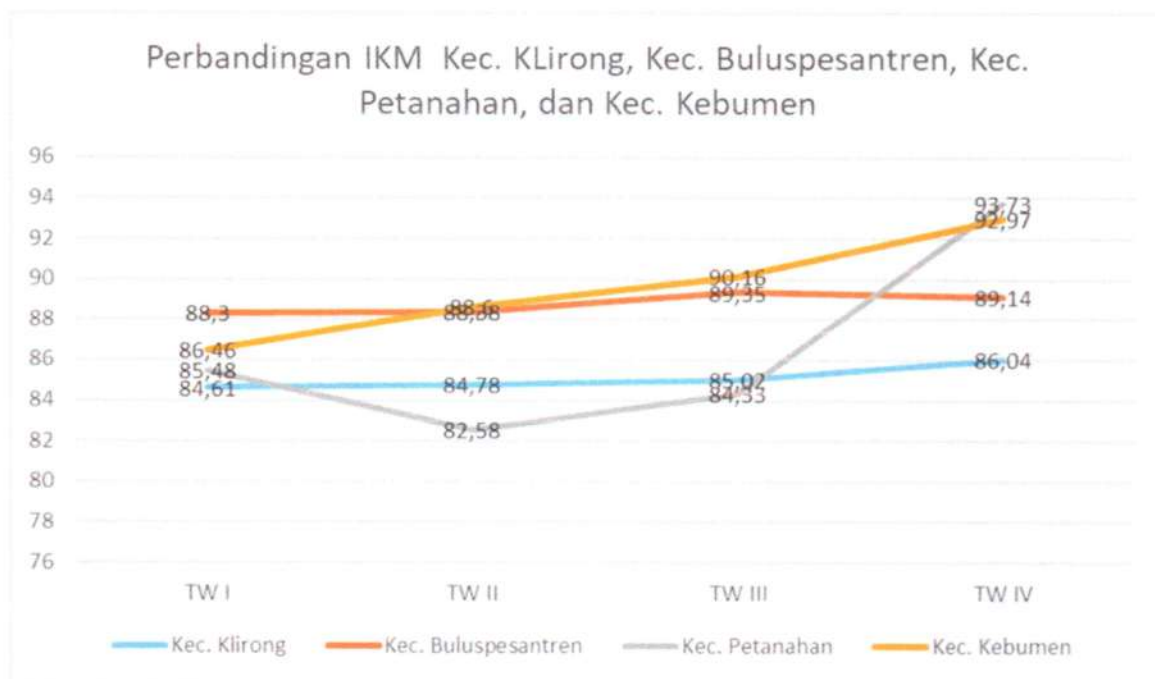
No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84,93	102,32%	86	98,75%

Sumber : Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, 2022.

Realisasi IKM tahun 2022 (84,93) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (83,62) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 102,32% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 98,75%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Kebumen dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:





IKM Triwulanan Kecamatan Klirong jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Buluspesantren, Kec. Petanahan, dan Kec. Kebumen Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan II dan III lebih tinggi dari IKM Kec. Petanahan akan tetapi lebih rendah dari IKM Kec. Buluspesantren, IKM Kec. Petanahan dan IKM Kec. Kebumen pada Triwulan I dan IV demikian realisasi IKM Kecamatan Klirong masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Klirong, IKM Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Kebumen Tahun 2022

No	Unsur	Nilai Kec. Klirong		Nilai Kec. Buluspesantren		Nilai Kec. Petanahan		Nilai Kec. Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	88,05	Baik	85,62	Baik	83,49	Baik	86,06	Baik
2	Prosedur	88,41	Sangat Baik	84,28	Baik	83,93	Baik	84,37	Baik
3	Waktu Pelayanan	80,59	Baik	82,21	Baik	83,32	Baik	83,37	Baik
4	Biaya/Tarif	99,15	Sangat Baik	99,90	Sangat Baik	98,94	Sangat Baik	98,24	Sangat Baik
5	Produk Layanan	82,81	Baik	87,42	Baik	85,33	Baik	88,22	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	79,83	Baik	87,44	Baik	84,33	Baik	87,62	Baik
7	Perilaku Pelaksana	82,38	Baik	89,35	Sangat Baik	84,28	Baik	84,11	Baik
8	Sarana dan Prasarana	82,42	Baik	91,45	Sangat Baik	83,75	Baik	85,31	Baik
9	Penanganan Pengaduan	91,35	Sangat Baik	99,55	Sangat Baik	99,17	Sangat Baik	97,18	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kec. Klirong rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Kompetensi Pelaksana, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah evaluasi kompetensi kinerja pegawai secara berkala.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).

3. Perilaku Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah evaluasi kinerja petugas pelaksana layanan secara berkala.

### 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

#### 3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
<b>Tujuan</b>						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,32%				
<b>Sasaran</b>						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	104,25%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	Menunjang
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	99,76%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,90%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,46%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah	99,72%	Menunjang

			Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	89,09%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,39%	Menunjang
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Publik</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	99,03%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	99,03%	Menunjang
			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	93,99%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	93,99	Menunjang
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	95,81%	Menunjang
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	95,81%	Menunjang

			Pemerintahan Desa	Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Rata-rata	95%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (Empat) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

### 3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. .. Efisiensi Anggaran Kecamatan Klirong  
Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan</b>							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	83	86,53	104,25%	45.731.763.000	43.717.964.026	95,60%	3,30%
<b>Sasaran</b>							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	83	84,93	102,32%	2.431.320.000	1.905.188.628	78,36%	20,12%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 20,12% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara - 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Setda Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 84,93 atau capaian kinerja sebesar 102,32% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 95% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2022 (84,93) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (83,62) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

### **4.2. SARAN**

IKM Kecamatan Klirong rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Kompetensi Pelaksana, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah evaluasi kompetensi kinerja pegawai secara berkala.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Perilaku Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah evaluasi kinerja petugas pelaksana layanan secara berkala.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 30 Maret 2023



**EKO PURWANTO, S.STP., M.Si**  
NIP.19790116 199810 1 001